



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 57 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor : S- /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan
Rekening

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.05/2007 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan
ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening3)
pada4) untuk keperluan5)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....6).
NIP.



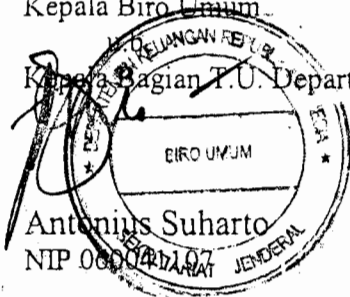
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(6)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(4)	Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata ushakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata ushakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain huruf a dan huruf b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(8)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(4)	Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain huruf a dan huruf b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(8)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

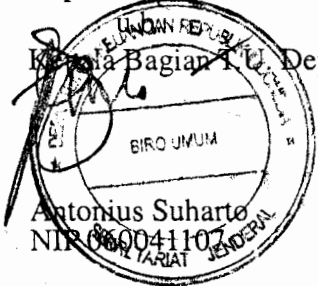


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini
(6)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(7)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian I Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,
ttt
SRI MULYANI INDRAWATI

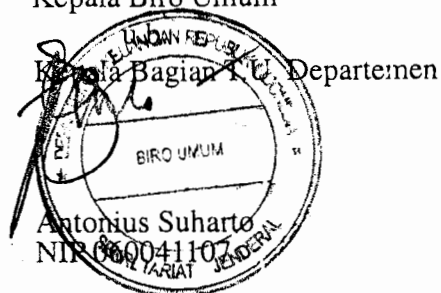


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini
(6)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(7)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 57 /PMK.05/2007 TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA

Nomor : S- /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan atas
Rekening yang sudah dibuka.

Yth.1)

di

.....2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, kami telah melakukan pembukaan rekening3) pada4) dengan nomor rekening 5) untuk keperluan6).

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....7).
NIP.

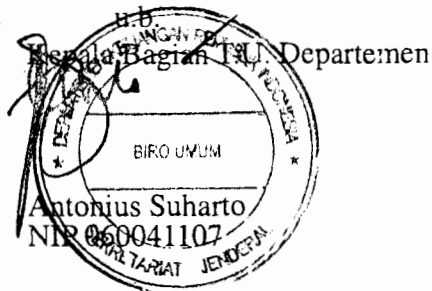


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN KERJA**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : nomor urut
(2)	Diisi : nama Kantor/Satuan Kerja
(3)	Diisi : nama Kementerian Negara/Lembaga
(4)	Diisi : kode Bagian Anggaran - Eselon I
(5)	Diisi : Jenis Rekening, misalnya giro atau deposito
(6)	Diisi : Nomor Rekening, misalnya 502.000.000
(7)	Diisi : Nama Rekening, misalnya Bendahara Umum Negara
(8)	Diisi : Nama Pemilik Rekening, misalnya Menteri Keuangan
(9)	Diisi : Nama Bank atau Kantor Pos, dimana rekening berada, misalnya Bank Indonesia
(10)	Diisi : Jumlah saldo pada rekening tersebut (dalam rupiah atau valuta asing) pada saat dilaporkan

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN,

ttd

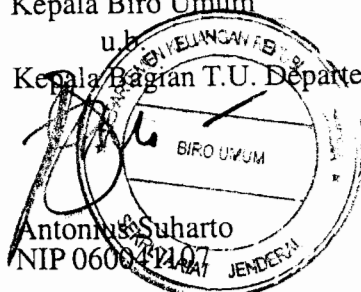
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)	Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)	Diisi : tanggal surat persetujuan Menteri Keuangan
(4)	Diisi : nomor surat persetujuan Menteri Keuangan
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(6)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka
(8)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(9)	Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u. b.
Kepala Bagian T.U. Departemen


Antony Suharto
NIP 060042107

MENTERI KEUANGAN,
td
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT

Nomor : S- /2007 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan tanggal3), Nomor4), kami telah melakukan pembukaan rekening5) pada6) dengan nomor rekening 7) untuk keperluan8).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....9).
NIP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

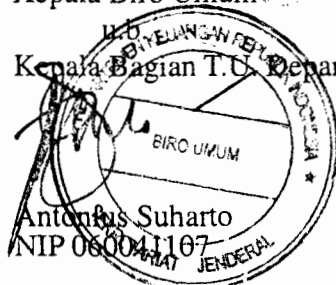
PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Persetujuan atau Penolakan
(2)	Diisi : Kepala Kantor/Satuan Kerja yang mengajukan surat permohonan pembukaan rekening
(3)	Diisi : nama kota dimana kantor tersebut pada angka (2) berlokasi
(4)	Diisi : tanggal surat permohonan pembukaan rekening
(5)	Diisi : nomor surat permohonan pembukaan rekening
(6)	Diisi : menyetujui atau tidak dapat menyetujui
(7)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(8)	Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(9)	Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(10)	Diisi : alasan penolakan (<i>kalau disetujui dihapus/tidak digunakan</i>)
(11)	Diisi : A.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
(12)	Diisi : Nama Jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI